

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesiapan kerja (*Job Readiness*) didefinisikan sebagai kondisi holistik yang mengindikasikan bahwa seseorang telah mencapai tingkat kesiapan yang mampu dan terintegrasi, meliputi dimensi pengetahuan, keterampilan, dan aspek profesional (Prasetyo & Prabowo, 2024). Kondisi ini penting untuk menjamin keberhasilan adaptasi dan fungsi individu saat memasuki dunia kerja serta dalam menjalankan tugas profesi tertentu (Amaliyah, 2024). Pencapaian kesiapan kerja yang optimal mensyaratkan penguasaan kompetensi dari tiga aspek utama yakni kompetensi kognitif yang mencakup pemahaman mendalam terhadap dasar teoritis dan regulasi, kompetensi teknis yang melibatkan kemampuan operasional dalam penggunaan alat atau sistem spesifik, serta kompetensi psikososial yang meliputi motivasi, efikasi diri, dan adaptabilitas yang diperlukan dalam lingkungan kerja dinamis (Jubaeli et al., 2025). Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, kesiapan kerja mahasiswa akuntansi di bidang perpajakan secara spesifik diukur dari kemampuan integrasi antara pemahaman literasi fundamental perpajakan dan penguasaan sistem administrasi perpajakan yang termodernisasi.

Perpajakan merupakan instrumen fiskal yang sangat vital dan fundamental bagi keberlangsungan negara, di mana perpajakan didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari wajib pajak kepada negara, yang berfungsi sebagai sumber utama pendapatan untuk membiayai seluruh

pengeluaran dan pembangunan nasional (Satriya et al., 2024). Selain fungsi anggaran, perpajakan juga berperan strategis sebagai alat regulasi untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan sosial (Mendrofa et al., 2025a). Oleh karena peran yang sangat sentral dan kompleks ini, sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat, ditandai dengan perubahan regulasi dan tuntutan persyaratan kepatuhan yang semakin ketat (Reyvani et al., 2024). Kondisi ini secara langsung memperjelas betapa mendesaknya kebutuhan akan ketersediaan tenaga ahli perpajakan yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kontras yang tajam dengan ketersediaan profesional tersebut; per akhir tahun 2024, tercatat hanya ada sekitar 7.390 konsultan pajak yang terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan, dan jumlah pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berada di kisaran 44.000 hingga 45.000 orang (Aurora K. M. Simanjuntak, 2025). Jumlah konsultan pajak tersebut, yang hanya menunjukkan peningkatan tipis dibandingkan data lama (5.917 konsultan per Juni 2021), menciptakan kesenjangan yang signifikan antara pasokan tenaga ahli dan permintaan pasar kerja (Herianti, 2025).

Fenomena kesiapan lulusan akuntansi perpajakan di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai krisis kompetensi di tengah kelangkaan profesional. Di satu sisi, kebutuhan industri terhadap tenaga ahli perpajakan yang kompeten meningkat tajam akibat dinamika regulasi yang cepat seperti adopsi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan transformasi digital

total pada sistem administrasi pajak melalui *Core Tax Administration System* (CTAS) (Purnamasari et al., 2025). Di sisi lain, pasokan tenaga ahli bersertifikasi sangat terbatas, di mana Kementerian Keuangan mencatat konsultan pajak yang terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) hanya berjumlah sekitar 7.390 orang per akhir tahun 2024 (Aurora K. M. Simanjuntak, 2025). Sedangkan data dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang makassar menunjukkan angka yang sangat terbatas untuk melayani tingginya volume wajib pajak individu, UMKM, dan perusahaan besar di Makassar tercatat hanya 58 anggota berdasarkan laporan rapat anggota pemilihan periode 2024-2029. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada fenomena gap kompetensi lulusan yang masih mengandalkan pembelajaran teoritis. Keterbatasan studi kasus nyata yang relevan dengan praktik industri dan minimnya pelatihan intensif menggunakan *software* perpajakan terkini menyebabkan lulusan memerlukan waktu adaptasi yang lama, sehingga tidak serta merta dapat menutup kebutuhan industri (Nurul Hidayat et al., 2025). Kesenjangan ini menjadi penekanan krusial bagi pendidikan tinggi untuk merevisi kurikulum agar lebih adaptif dan praktis, sehingga mampu menghasilkan *supply* talenta yang benar-benar siap menjadi solusi atas kelangkaan profesionalisme perpajakan di Indonesia.

Hal utama yang mempengaruhi kesiapan adalah kompetensi digital dan teknis, di mana pekerja pajak baik dari sisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perusahaan, maupun konsultan dituntut untuk segera beradaptasi dari metode

kerja yang terfragmentasi dan manual menuju sistem yang terintegrasi penuh dan berbasis *big data* (Fajriyah, 2025).

Pergeseran tuntutan keahlian dalam analisis dan validasi data yang sudah diisi otomatis oleh sistem, bukan lagi sekadar entri data atau input laporan manual, sehingga fokus kerja beralih ke perencanaan strategi pajak dan mitigasi risiko pemenuhan yang kompleks (Rahmadi & Ak, 2025). Selain kompetensi, kesiapan *institutional* dan *soft skill* juga sangat menentukan, meliputi kemampuan beradaptasi terhadap sistem perpajakan di masa transisi, akses terhadap infrastruktur jaringan yang mumpuni, serta tersedianya pelatihan teknis mendalam untuk memastikan semua pihak dapat mengoperasikan fitur-fitur baru coretax secara optimal, dari registrasi wajib Pajak hingga *Taxpayer Account Management* (TAM) (Purnamasari et al., 2025). Singkatnya, kesiapan kerja di era coretax ditentukan oleh seberapa cepat individu dapat mengombinasikan pemahaman regulasi pajak yang kuat dengan penguasaan teknologi sistem terpadu yang baru.

Perubahan mendasar pada kondisi teknologi akuntansi secara langsung menuntut transformasi kompetensi lulusan akuntansi, dari sekedar pemahaman teori menjadi penguasaan kompetensi operasional (Maresti et al., 2023). Oleh karena itu, literasi perpajakan dan pemahaman *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan prasyarat mendasar bagi mahasiswa dalam menghadapi tuntutan dunia kerja. Urgensi penguasaan literasi perpajakan harus didahulukan karena inti dari profesi perpajakan adalah kepatuhan terhadap regulasi yang bersifat dinamis (Fajriyah, 2025). Seorang profesional dituntut memiliki

kemampuan untuk menganalisis transaksi kompleks, menafsirkan ketentuan undang-undang perpajakan, serta mengatur perlakuan pajak yang akurat (Antika et al., 2025). Proses ini sepenuhnya didasarkan pada fondasi pengetahuan teoritis, bukan semata-mata kemampuan mengoperasikan sistem (Faratunnisa & Afifah, 2024). Dengan demikian, literasi perpajakan menjamin akurasi substantif apa yang harus dilakukan, karena kekeliruan interpretasi atas regulasi walaupun dilaksanakan melalui sistem teknologi tercanggih tetap berpotensi menimbulkan sanksi dan risiko (Pelangi et al., 2025).

Pemahaman CTAS menjadi sama krusialnya karena dalam ekosistem digital saat ini, keseluruhan proses pemeliharaan harus dilaksanakan melalui sistem terpadu tersebut (Solihin et al., 2024). Pasar kerja menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjamin efisiensi operasional melalui prosedur implementasi kapabilitas dengan cepat mengintegrasikan data akuntansi ke dalam CTAS, melakukan pelaporan, dan melakukan pengiriman pajak secara digital (Angelina et al., 2025). Kegagalan dalam menguasai CTAS dianalogikan sebagai ketidakmampuan beroperasi dalam lingkungan perpajakan modern, mencapai kompetensi wajib yang setara dengan penguasaan regulasi (Arianty et al., 2024). Dengan mengintegrasikan akurasi substantif literasi perpajakan dan efisiensi operasional digitalisasi perpajakan CTAS, mahasiswa akuntansi dapat direkrut menjadi lulusan yang kompeten dan mampu bekerja, serta mampu meminimalkan risiko keberadaan perusahaan di tengah berlangsungnya transformasi digital (Purnamasari et al., 2025).

Penelitian ini berfokus pada dua kompetensi krusial yang saling melengkapi sebagai penentu kesiapan mahasiswa akuntansi dalam menghadapi dunia kerja di bidang perpajakan, sebuah bidang yang kini menuntut perpaduan kecakapan kognitif dan keterampilan digital. Literasi perpajakan, sebagai kompetensi pertama, mengacu pada pemahaman kognitif mendalam mengenai aturan, prosedur, dan etika perpajakan yang menjadi landasan profesional. Meskipun temuan empiris secara umum menegaskan hubungan yang kuat dan nyata antara literasi ini dengan kesadaran dan minat berkarir di bidang perpajakan (Yakin & Widayati, 2022), terdapat juga temuan yang kurang konsisten, di mana pengetahuan saja dinilai tidak cukup untuk menjamin terwujudnya tanpa faktor pendukung lain (Herlinda, 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada pengujian validitas literasi dasar di tengah-tengah gangguan teknologi. Sementara itu, pemahaman terkait digitalisasi perpajakan (*Core Tax Administration System/CTAS*) memperkuat peringkat sebagai kompetensi kedua yang bersifat adaptif dan spesifik, menjadikannya modal teknis penting untuk beroperasi secara efektif dalam ekosistem digital yang baru (Khusniah et al., 2025).

Sistem terpadu coretax, yang merupakan pusat reformasi administrasi perpajakan di Indonesia, menuntut adaptasi yang cepat dari calon profesional. Penelitian menggarisbawahi peran utamanya di mana persepsi kegunaan sistem ini menjadi pendorong utama adopsi teknologi (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Namun, ulasan awal juga menunjukkan adanya tantangan implementasi dan kendala teknis, yang mengindikasikan bahwa hanya pemahaman teoritis

coretax tidak cukup tanpa penguasaan praktis yang memadai (Arifqi, 2025). Oleh karena itu, urgensi penelitian ini adalah untuk mengukur kesiapan mahasiswa akuntansi dengan menguji sinergi antara literasi perpajakan yang bersifat normatif dan pemahaman coretax yang bersifat teknis adaptif, memastikan lulusan memiliki keunggulan kompetitif yang relevan dengan administrasi perpajakan di masa depan.

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan dirancang untuk memprediksi serta menjelaskan perilaku manusia yang spesifik dalam konteks tertentu (Ajzen, 1991). Dalam konteks penelitian ini, dimodelkan sebagai intensi perilaku untuk mengadopsi karier di bidang perpajakan. TPB menyatakan bahwa intensitas perilaku dipengaruhi secara signifikan oleh kontrol perilaku yang dirasakan. Oleh karena itu, TPB sangat cocok karena variabel penelitian independen, yaitu literasi perpajakan dan pemahaman coretax, secara teoritis berfungsi sebagai faktor penentu utama dari kontrol perilaku yang dirasakan. Mahasiswa dengan tingkat literasi perpajakan yang tinggi akan memiliki keyakinan kontrol yang kuat atas kemampuan individu tersebut dalam memahami regulasi dan melakukan praktik perpajakan. Demikian pula, penguasaan terhadap teknologi kunci seperti coretax meningkatkan persepsi mahasiswa mengenai ketersediaan sumber daya dan fasilitas untuk menyelesaikannya. Peningkatan kontrol perilaku yang dirasakan ini dipicu oleh pengetahuan dan pemahaman teknis, selanjutnya diprediksi akan meningkatkan kesiapan mahasiswa secara keseluruhan untuk memasuki dan bersaing di pasar kerja perpajakan. Dengan

demikian, TPB menyediakan landasan kausal yang kokoh untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel kompetensi terhadap niat karir spesifik.

Literasi perpajakan adalah kemampuan individu untuk memahami, mengakses, mengolah, dan menggunakan informasi serta konsep yang berkaitan dengan seluruh aspek perpajakan. Kemampuan ini mencakup penguasaan mendalam terhadap aturan, tarif, subjek, objek, dan tata cara perpajakan, serta membentuk kesadaran moral dan etika mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi negara (Surianto et al., 2025). Bagi mahasiswa akuntansi, literasi akuntansi berfungsi sebagai fondasi kognitif dan normatif yang esensial, meningkatkan efikasi diri dan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang benar dan menjunjung integritas saat mereka memasuki dunia kerja (J. A. Putri, 2025).

Digitalisasi Perpajakan *Core Tax Administration System* (CTAS) adalah kemampuan teknis dan adaptif yang dimiliki calon profesional dalam menguasai dan berinteraksi secara efektif dengan sistem teknologi informasi terpadu dan mutakhir yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). CoreTax merupakan tulang punggung reformasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis pajak (dari pendaftaran hingga pelaporan dan pengumpulan) ke dalam satu platform digital (Utama & Yuliana, 2025). Oleh karena itu, Pemahaman coretax adalah modal teknis yang krusial karena menjembatani pengetahuan aturan dengan kemampuan operasional di lapangan, memastikan lulusan siap menangani dan menggunakan alat kerja tercanggih dalam ekosistem perpajakan yang terdigitalisasi.

Meskipun hubungan antarvariabel ini logis, terdapat *research gap* yang perlu dijawab secara empiris. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang kontradiktif atau tidak konsisten ada temuan yang menyatakan bahwa literasi tinggi tidak selalu menjamin kesiapan kerja jika keterampilan teknis diabaikan. Penelitian sebelumnya oleh Khotmi & Fauzi (2025) literasi yang tinggi, tidak serta merta mendorong kesiapan atau minat kerja jika faktor lain seperti kegunaan teknologi lebih dominan. Sebaliknya, pengetahuan teknologi tanpa fondasi literasi regulasi yang kuat juga tidak efektif (Zega et al., 2024). Kontradiksi ini, ditambah dengan kurangnya penelitian yang secara spesifik menguji dampak coretax yang merupakan isu pertukaran dalam perpajakan, menuntut adanya verifikasi ulang dengan data empiris yang baru dan kontekstual.

Kontribusi penelitian ini adalah untuk membangun keyakinan mahasiswa akuntansi Universitas Muslim Indonesia (UMI) melalui sosialisasi dan edukasi temuan ilmiah yang membuktikan bahwa literasi perpajakan (penguasaan aturan dan regulasi) dan digitalisasi perpajakan *Core Tax Administration System* (CTAS) (penguasaan teknologi digital) adalah dua kompetensi krusial yang mutlak penting dan harus dikuasai untuk berhasil dalam dunia kerja perpajakan modern. Fokus populasi penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi dengan konsentrasi perpajakan Universitas Muslim Indonesia (UMI). UMI, sebagai institusi pendidikan tinggi strategis, harus memastikan lulusannya siap menghadapi persaingan di pasar kerja regional dan nasional. Adanya coretax system menciptakan *local gap* yang signifikan pada

populasi ini dan perlu diukur secara kuantitatif apakah tingkat literasi perpajakan dan pemahaman coretax yang telah diterima mahasiswa UMI telah mencapai titik optimal untuk mendukung kesiapan kerja mahasiswa.

Untuk menjembatani *research gap* dan menjawab pertanyaan spesifik mengenai hubungan kausal antarvariabel pada populasi UMI, penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Metode ini dijustifikasi karena tujuan utamanya adalah menguji hipotesis secara statistik, mengukur intensitas dan besaran pengaruh, serta memberikan bukti empiris yang terukur, objektif, dan valid sebagai dasar rekomendasi akademik.

Berdasarkan seluruh uraian, identifikasi variabel, dan kebutuhan untuk memverifikasi secara statistik pengaruh kedua faktor kunci tersebut terhadap kesiapan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muslim Indonesia (UMI), penelitian ini dirumuskan dengan judul **“Pengaruh Literasi Perpajakan dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kesiapan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muslim Indonesia dalam Menghadapi Dunia Kerja di Bidang Perpajakan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Literasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesiapan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muslim Indonesia dalam Menghadapi Dunia Kerja di Bidang Perpajakan?

2. Apakah Digitalisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesiapan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muslim Indonesia dalam Menghadapi Dunia Kerja di Bidang Perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menguji pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kesiapan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muslim Indonesia dalam Menghadapi Dunia Kerja di Bidang Perpajakan.
2. Untuk mengetahui serta menguji pengaruh Pemahaman CoreTax terhadap Kesiapan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muslim Indonesia dalam Menghadapi Dunia Kerja di Bidang Perpajakan..

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran atau wawasan yang berguna bagi peneliti selanjutnya dalam mempelajari lebih lanjut tentang peraturan perpajakan yang relevan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat peneliti khususnya dalam mengevaluasi penerapan peraturan perpajakan lainnya.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu universitas memberikan informasi untuk dunia pendidikan terutama dalam konteks pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan, terkait pendidikan pajak agar lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa akuntansi di dunia kerja.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan wawasan penting kepada mahasiswa dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang betapa krusialnya penguasaan pengetahuan perpajakan (Literasi Perpajakan) dan sistem administrasi baru seperti CoreTax. Pemahaman ini berfungsi sebagai modal utama yang akan menentukan kemampuan bersaing dan peluang karir mahasiswa di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih aktif dan berinisiatif dalam menambah dan mengembangkan kemampuan teknis serta pemahaman mereka terhadap regulasi pajak yang dinamis. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah agar mahasiswa lulus sebagai tenaga profesional yang siap langsung bekerja dan mampu menyesuaikan diri secara cepat dengan perkembangan sistem perpajakan yang berkelanjutan.